

Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul
Dalam Program Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2016

Tiwining Utami

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tiwining.utami.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah berupa bantuan-bantuan yang dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional maupun global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hak lansia yang sama dengan setiap warga negara Indonesia. Hak yang sama diberikan untuk lanjut usia dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial untuk dirinya sebagai tanda penghormatan dari pemerintah. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengacu pada program pelayanan sosial lanjut usia Kementerian Sosial RI, membuat berbagai macam program atau kegiatan di bidang pelayanan sosial lanjut usia baik menggunakan dana APBD maupun APBN. Memperlihatkan presentase lansia menurut provinsi, dimana lansia terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 13,69% disusul Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,05%. Dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,80%. Besar nya presentase ini perlu menjadi perhatian tersendiri mengingat di satu sisi semakin meningkatnya lansia berarti kualitas hidup semakin baik seiring semakin baiknya akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sehingga usia harapan hidup meningkat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku daerah yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia mengantisipasi tingginya jumlah lansia dengan menerapkan beberapa program pelayanan sosial lansia. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Kesejahteraan Lanjut Usia , Kesuksesan Program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial dilihat dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto yaitu Produktifitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, Akuntabilitas dari kelima indikator tersebut belum semua dijalankan dengan baik ada pula yang sudah dijalankan dengan baik. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Kesejahteraan Lanjut Usia agar kualitas layanan lebih ditingkatkan mengingat bantuan yang diberikan belum bisa bersamaan dalam satu waktu. Akan lebih baik jika program tersebut dilakukan secara bersamaan di seluruh Daerah Kabupaten Bantul secara bersamaan.

Kata kunci :Kinerja, Kesejahteraan Lanjut Usia, Kabupaten Bantul

1. Pendahuluan

Memperlihatkan presentase lansia menurut provinsi, dimana lansia terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 13,69% disusul Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,05%. Dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,80%. Besarnya presentase ini perlu menjadi perhatian tersendiri mengingat di satu sisi semakin meningkatnya lansia berarti kualitas hidup semakin baik seiring semakin baiknya akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sehingga usia harapan hidup meningkat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku daerah yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia mengantisipasi tingginya jumlah lansia dengan menerapkan beberapa program pelayanan sosial lansia. Program pelayanan sosial lansia yang diberikan merupakan bentuk jaminan sosial yang bisa diakses oleh orang yang membutuhkan. Program yang dilakukan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak baik swasta, lingkungan maupun keluarga sehingga akan terwujud jaminan sosial yang menghargai pada local wisdom. Untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Sosial telah melakukan program untuk lanjut usia potensial maupun yang tidak potensial, khususnya yang mengalami keterlantaran dan kekerasan.

Mengacu pada program pelayanan sosial lanjut usia Kementrian Sosial RI, berbagai macam program atau kegiatan di bidang pelayanan sosial lanjut usia baik memamui dana APBD maupun APBN yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Jaminan Sosial Lanjut Usia
2. Bantuan pemakaman bagi lanjut usia terlantar
3. Bimbingan soaial usaha ekonomi produktif
4. Fasilitas pelayanan lanjut usia melalui homecare

5. Pendampingan lanjut usia korban erupsi merapi
6. Pelaksanaan KIE dan kampanye sosial dalam rangka hari lanjut usia nasional.

Selain itu Dinas Sosial Provinsi DIY juga menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lanjut usia melalui Panti Sosial Tresna Werdha yang terdiri dari 2 unit yaitu Unit Abiyasa Pakem Sleman dan Unit Budhi Luhur Kasongan Bangunjiwo Kasihan Bantul. Kultur yang tumbuh di masyarakat Indonesia menyebabkan partisipasi lansia terhadap panti jompo masih terbilang rendah. Jumlah klien Panti Soalia Tersna Werdha (PSTW) dari sekian banyak lansia yang ada di DIY yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 214 orang penghuni.

Bantul adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberi pelayanan sosial lansia secara mandiri. Artinya selain adanya pelayanan sosial dari Dinas Sosial DIY Pemerintah Kabupaten Bantul juga memberikan pelayanan sosial kepada lansia diwilayahnya. Program pelayanan sosial yang diberikan tidak berbeda jauh dengan pelayanan sosial Dinsos DIY. Dalam program tersebut terbagi menjadi tiga yaitu untuk lansia produktif dan lansia tidak produktif serta untuk lansia terlantar. Masing-masing tersebut mempunyai perbedaan.

1. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang memberi bantuan kepada lansia terlantar tidak potensial dalam bentuk uang tunai Rp. 200.000,00 setiap bulan bisa dibidang ini adalah bantuan secara ekonomi.jumlah penerima ASLUT pada tahun 2011-2012 berjumlah 340 orang.
2. Pemberdayaan lansia yaitu program untuk lansia potensial dengan memberikan pelatihan keterampilan dan memberi bantuan modal.

2. Kerangka Teori

Kinerja adalah prestasi yang dapat dicapai seseorang atau organisasi berdasarkan kriteria dan alat ukur tertentu. Parameter yang paling umum digunakan, menurut Drucker (1977) adalah efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Sedangkan menurut Hasibuan (1990) kinerja adalah prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan. Ia merupakan hasil yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu yang tersedia (Hasibuan, 1990:41).

Indikator kinerja adalah sesuatu yang di jadikan alat ukur kinerja atau hasil yang di capai. indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah di tetapkan. indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. indikator kinerja adalah suatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Yang disebut dengan indikator kinerja sering diartikan volume kualitatif dan kuantitatif yang memperlihatkan seberapa besar yang telah dicapai dari sasaran dan tujuan organisasi

Menurut Dwiyanto, ada lima indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Eriek, 2013:78),

1. Produktivitas

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Pelayanan ini dimaksudkan dalam melaksanakan program dan untk melaksanakan program tersebut di perlukan sebuah anggaran.

Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktifitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada rasio. Konsep baru ini dikembangkan General Accounting Office (GAO).

2. Kualitas Layanan

Pembahasan mengenai pentingnya suatu kualitas pelayanan yang didukung dengan kinerja organisasi pelayanan publik. Beberapa pandangan yang kurang baik mengenai kualitas pelayanan organisasi publik kerap kali muncul akibat ketidakpuasan seseorang dalam mendapatkan suatu pelayanan publik oleh organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah seberapa besar kemampuan organisasi publik dalam mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memprioritaskan suatu hal serta pengembangan suatu program pelayanan publik yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah pengukuran pelaksanaan suatu program atau kegiatan oleh organisasi publik apakah berpedoman pada suatu prinsip administrasi yang baik atau pada kebijakan organisasi serta apakah sarana dan prasarana mendukung.

5. Akutabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Nazir,1999:63). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat menggambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi, dan fenomena, tentang Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Kesejahteraan Lansia.

4. Pembahasan dan Analisis

Dalam mensejahterakan lansia dibutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pihak seperti menkumham, mensos, dan menkes dengan pemerintah daerah/provinsi, pemerintah daerah disini yang menjalankan setiap program-program yang telah di buat untuk mensejahterakan lanjut usia. Dan peneliti memilih Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian karena mulai Tahun 2014 Bantul ditetapkan sebagai daerah percontohan pemberdayaan lansia, untuk menuju lansia yang bahagia, sehat dan sejahtera.

Pembahasan disini dapat diketahui oleh setiap program yang dijalankan, diantaranya Program ASLUT Program untuk lansia tidak potensial dan yang kedua adalah Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan). Didalam setiap program tersebut terdapat pelayanan yang diberikan dengan menyesuaikan kebutuhan lansia dan tujuan setiap pelayanan. Berikut akan dibahas secara detail bagaimana pelaksanaan Program ASLUT dan Pemberdayaan Lansia Potensial

(Pemberian Ketrampilan). Dengan demikian untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam program ASLUT dan Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan) digunakan beberapa indikator pengukuran kinerja, yaitu melalui Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan akuntabilitas.

4.1. Produktivitas

Produktivitas biasanya dapat dinilai dengan membandingkan antara input dan output dari suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan secara matang. Semakin banyaknya output yang dihasilkan dengan baik bahkan melebihi tujuan oleh tiap-tiap pegawai yang melaksanakan maka semakin produktif program yang di jalankan, namun semakin sedikit output yang diterima dan tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan utama maka semakin tidak produktif program tersebut.

Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Bapak Iryanta, 2 April 2018, Pukul: 08.03) mengatakan bahwa :

“Mengenai produktivitas tentu adanya input dan output terkait program ini ya, bahwa perlu diketahui program ASLUT dan Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan) bertujuan untuk mensejahterakan lanjut usia, sampai saat ini program tersebut output yang dihasilkan sudah baik”

Tujuan dari program tersebut adalah

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal lanjut usia telantar
2. Meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak hak lanjut usia telantar
3. Terlaksananya rehabilitasi perawatan sosial dan advokasi sosial bagi lanjut usia telantar.

Selain mengukur kinerja melalui perbandingan antara input dan output, kinerja dapat dilihat dari para pegawai atau kelompok organisasi publik dalam segi pencapaian tujuan. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Bapak Iryanta, 2 April 2018, Pukul: 08.10 WIB) mengatakan bahwa:

“ Produktivitas juga bisa dilihat dari pencapaian hasil yang dilihat dari bagaimana pemangku menjalankan tugas dan peran untuk mencapai tujuan. Dengan menjalankan peran masing-masing dengan baik dan saling bekerjasama akan mencapai hasil yang di inginkan”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa cara pencapaian hasil yang di inginkan adalah dengan cara setiap pegawai melaksanakan perannya dengan baik dan saling bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang di inginkan atau sesuai harapan. Adapun rincian peran dari setiap pelaksana program ASLUT dan Pelatihan Lansia Potensial yaitu:

1. Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

Menunjuk seorang Koordinator yang bertanggung jawab dalam penyediaan data calon penerima ASLUT sesuai kriteria, serta memfasilitasi pelaksanaan ASLUT tingkat Kabupaten/ Kota, dengan tugas:

- a. Melakukan pendataan, menyeleksi dan merekapitulasi data calon penerima ASLUT di tingkat Kab/Kota.
- b. Mengusulkan calon penerima, pendamping dan koordinator ASLUT untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- c. Melaksanakan pembinaan untuk pendamping ASLUT di wilayahnya.
- d. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ASLUT di wilayah Kab/Kota.

- e. Membuat surat penunjukan pengganti penerima ASLUT berdasarkan berita acara penggantian penerima ASLUT dari pendamping untuk disampaikan ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan ASLUT di wilayah Kab/Kota secara periodik.
- g. Menarik dan menyerahkan kartu ASLUT untuk disampaikan ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi setiap akhir tahun atau paling lambat minggu kedua awal tahun berikutnya.
- h. Memastikan terpasangnya STIKER penerima ASLUT di tempat tinggal penerima.
- i. Menangani Kasus sesegera mungkin setelah diterimanya laporan/pengaduan masyarakat, bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lain dalam menyelesaikan pengaduan dan melaporkannya ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- j. Memfasilitasi semua penerima program untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Pendamping

Bertanggungjawab dalam melakukan pendampingan kepada penerima ASLUT dengan tugas:

- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Prop/Kab/Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat;
- b. Melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam satu bulan dan membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima ASLUT;

- c. Melaksanakan perawatan Sosial, Advokasi Sosial dan Pendampingan dalam pemanfaatan dana ASLUT;
- d. Mengambil bantuan ASLUT atas nama Penerima ke Lembaga Penyalur terdekat dengan membawa Surat Kuasa dari Penerima dengan ditanda tangani pendamping dan diketahui Koordinator Pendamping Kab/Kota.
- e. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar menukar informasi dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan pendampingan.
- f. Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program ASLUT secara periodik ke Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota.
- g. Membuat laporan dan berita acara penggantian penerima ASLUT sesuai dengan daftar tunggu (yang telah dikirimkan ke Direktorat RSLU (sesuai kriteria) apabila terdapat penerima ASLUT yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai dengan kriteria ke Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota.
- h. Memfasilitasi semua penerima program untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) .

a. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan

Penekanan yang sangat penting pada keefektifan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi dan keefektifan adalah kunci kesuksesan dari suatu organisasi. Banyak pengertian atau makna dari efektif pengertiannya dapat menyangkut beberapa dimensi yang di pusatkannya perhatian pada berbagai kriteria evaluasi. Kemudian dalam pengukuran banyak ragam dimana kriteria yang berbeda-beda di lakukan secara bersamaan. Efektifitas adalah tingkat ukuran keberhasilan tercapai atau tidak nya sebuah tujuan organisasi. Apabila organisasi tersebut berhasil maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Serta sejauh mana suatu organisasi

yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

4.2.Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan kinerja organisasi publik. Pandangan negatif selalu bermunculan ketika masyarakat menilai suatu kualitas pelayanan. Hal demikian terjadi karena banyak rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan suatu organisasi publik. Untuk itu sebaiknya sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya setiap pemangku tugas pelaksana mengetahui terlebih dahulu bagaimana peran, tugas dan wewenang yang perlu dilakukan ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.

a. Kepuasan Lansia Terhadap Kualitas Layanan

Memahami kebutuhan dan keinginan dalam hal ini adalah lansia merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai nilai kepuasan atas pemberian bantuan dalam bentuk program ASLUT dan Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan) yang diberikan oleh pihak Pemerintah. Lansia yang merasa puas akan merasa terbantu dan senang serta merasa diperhatikan, tetapi bila lansia merasa tidak puas, lansia akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya.

Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Bapak Iryanta, 2 April 2018, Pukul: 08.15 WIB) mengatakan bahwa:

“ Kalau tentang kualitas pelayanan itu kan yang bisa menilai adalah masyarakat yang merasakan juga masyarakat dan dalam program ini adalah Lansia sebagai objek dari program tersebut, kami selaku yang

menjalankan tugas pastinya melakukan program tersebut dengan sangat maksimal begitupula dengan desa serta pendamping juga selalu memberikan kualitas pelayanan dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku”.

4.3.Responsibilitas

Responsibilitas berasal dari kata response yang berarti tanggapan. Jika seseorang menanyakan suatu hal dan yang ditanya dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tepat maka orang yang ditanya tersebut disebut bresponsif. Responsif ini dibutuhkan kemampuan dalam bereaksi dengan cara cara yang proposional dan dalam waktu yang cepat. Meskipun demikian tidak semua yang segera itu lebih baik. Ada juga yang berlebihan reaksi sehingga tidak bisa mengontrol diri dan tidak proporsional yang sering di sebut dengan impulsif.

Membahas mengenai Responsibilitas, dalam penelitian ini responsibilitas berhubungan dengan kesesuaian program dengan visi dan misi terkait pelaksanaan Program ASLUT dan Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan). Visi yang ada dalam program ini adalah untuk menurunkan angka lansia terlantar, dan untuk misi dalam program ini adalah melakukan pendataan lansia terlantar secara kompleks dan lebih memperhatikan kesejahteraan lansia.

Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Bapak Iryanta, 2 April 2018, Pukul: 08.20 WIB) mengatakan bahwa:

“ Tentu saja program ini di dasari dari visi dan misi program, untuk visinya adalah untuk menurunkan jumlah lansia terlantar sedangkan misinya adalah pendataan lansia terlantar untuk lebih memperhatikan kesejahteraan

lansia mengingat lansia itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri”

a. Kesesuaian program dengan kebijakan organisasi

Seberapa jauh suatu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan yang sesuai dengan implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dikerjakan dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip administrasi serta kesesuaian dengan peraturan dan kebijaksanaan organisasi maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.

Adapun kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam Program ASLUT dan Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan) adalah Sosialisasi .Sosialisasi di tunjukkan kepada desa/lurah, pendamping, tokoh masyarakat, PKK, serta lintas sektor tingkat Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang tujuan, manfaat dan mekanisme pelaksanaan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial agar mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan. Sosialisasi ini di berikan terutama kepada lansia agar mereka mengetahui adanya program tersebut. Sosialisasi di lakukan di poslansia yang biasanya dilakukan satu bulan sekali atau bisa juga dengan sosialisasi formal tentang program sesuai dengan kesepakatan yang memiliki peran penting dalam program tersebut.

4.4.Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan suatu birokrasi atau organisasi untuk lebih memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian nantinya disusun sebagai agenda kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai prioritas

utama dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian responsivitas dapat diartikan sebagai daya tanggap dan daya tangkap suatu birokrasi atau organisasi dalam memahami dan menanggapi keinginan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam menanggapi permintaan dan memahami keinginan masyarakat, program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial ini menjadi salah satu kegiatan untuk menyalurkan aspirasi berupa keluhan dan keinginan masyarakat yang biasanya diarahkan dalam kegiatan sosialisasi terlebih dahulu tentang adanya program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial. Tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tersebut, di setiap kegiatan yang nantinya di selenggarakan di sediakan kotak kritik dan saran untuk diberikan kepada masyarakat se usai kegiatan berlangsung. Selain itu kami juga menyediakan nomor dan alamat email yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alat komunikasi penyampaian aspirasi apabila mereka tidak menyampaikannya melalui kritik dan saran ataupun saat kegiatan penyelenggaraan berlangsung. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Bapak Iryanta, 2 April 2018, Pukul: 08.25 WIB) mengatakan bahwa:

“Kebutuhan setiap lansia kan berbeda-beda jadi untuk mengetahui apa saja yang menjadi keluhan para lansia serta keinginan para lansia kami mendapatkan data dari desa tugas kami hanya meneruskan apa keinginan para lansia keluhan para lansia itu semua yang mencari data adalah desa, kemudin setelah dari desa baru akan di proses. Dengan kita mengetahui apa yang di inginkan lansia kita bisa mewujudkannya melalui program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial

ini. Untuk Aslut di peruntukkan lansia yang sudah tidak potensial lagi yang tidak bisa bekeja di berikan uang setiap bulannya 200.000 untuk pelatihan lansia potensi di peruntukan bagi lansia yang masih memiliki potensi untuk di berikan pelatihan guna nya agar lansia bisa mandiri”

Salah satu narasumber lainnya yaitu pendamping (Bapak Santoso, 4 April 2018, Pukul 11.20 WIB)

“Saat saya berkunjung kerumah lansia-lansia ada juga yang menyampaikan kritik dan saranya untuk program Aslut ini tetapi kebanyakan dari mereka sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan”

Menurut hasil wawancara dari kedua narasumber diatas, maka sejauh ini responsivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial demi menurunkan angka lansia terlantar sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Terbukti bahwa untuk menjawab keinginan masyarakat terkait penurunan angka lansia terlantar dan untuk mensejahterakan lansia Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuat program yang sudah ditetetapkan yaitu Aslut Dan Pelatihan Lansia Potensial. Sehingga hidup lansia sudah terbantu dengan adanya program tersebut.

Selain itu Dinas Sosial Kabupten Bantul untuk menjaga kualitas pelayanan agar tetap baik selalu memanggil kepada pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemantauan disetiap pelaksanaan dan memonitoring serta evaluasi disetiap kegiatan kemudian melaporkan setiap 5 bulan sekali kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

4.5. Akuntabilitas

Tanggung jawab, evaluasi dan keterbukaan adalah hal penting dalam suatu kinerja. Tanpa adanya tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program menjadi tidak terkontrol dan dapat menyebabkan ketidaksampaian program terhadap tujuan. Kemudian kegiatan evaluasi juga diperlukan mengingat bahwa tidak setiap kegiatan atau program berjalan dengan baik tanpa adanya suatu hambatan apapun, maka dari itu evaluasi diperlukan guna mengontrol dan menindak lanjuti kegiatan apabila kegiatan dari suatu program terdapat kendala yang dapat memicu kegagalan dan tidak sampainya terhadap tujuan. Selain tanggung jawab dan evaluasi, keterbukaan pun menjadi salah satu hal terpenting dalam suatu kegiatan baik keterbukaan kegiatan antar pegawai dengan masyarakat, maupun keterbukaan antara atasan dengan pegawai dan keterbukaan antar sesama pegawai.

Ketiga hal tersebut penting untuk dilaksanakan dan perlu dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan yang dilakukan agar nantinya dapat memberi rasa kepercayaan terutama kepada sasaran utama yaitu kepada masyarakat bahwa program ini memang di tunjukkan untuk menurunkan angka lansia terlantar di Kabupaten Bantul. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Bapak Iryanta, 2 April 2018, Pukul: 08.30 WIB) mengatakan bahwa:

“ Hal terpenting dalam melakukan sebuah kegiatan atau program adalah tanggungjawab, keterbukaan dan evaluasi. Kita tidak bisa memantau satu satu setiap pegawai dan peran-peran lainnya dalam program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial ini. Jadi biasanya tanggung jawab dikitikan dengan tugas pelaksana masing-masing pegawai dengan acuan adanya standar operasional prosedur atau tatanan peran dan tanggung jawab setiap peran. Biasanya jika mengenai tanggung jawab ada nya sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai yang tidak melaksanakan

tugas dengan baik. Untuk evaluasi selalu diadakan mengingat setiap kegiatan tidak selalu berjalan tanpa hambatan guna ketika ada masalah bisa langsung dicarikan solusinya. Serta keterbukaan kepada masyarakat kita selalu jalankan mengenai anggaran atau kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat”

Dengan demikian menurut hasil wawancara dengan narasumber bahwa akuntabilitas yang memuat tanggung jawab, keterbukaan serta evaluasi dalam pelaksanaan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial sudah dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini belum ada keluhan mengenai program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial ataupun ketidaknyamanan atau kurangnya tanggungjawab yang diberikan oleh petugas atau pegawai kepada masyarakat. Tidak adanya ketidak terbuka antara pegawai dengan masyarakat ataupun antar sesama pegawai. Dan juga evaluasi yang selalu dijalankan sesuai dengan atauran yang telah ditetapkan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1.Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara dan pembahasan mengenai Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program meningkatkan kesejahteraan lansia tahun 2016 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial digunakan beberapa indikator pengukuran kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

a. Produktivitas

Pelaksanaan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial dilihat dari faktor produktifitas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari output yang didapatkan selama program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial berlangsung bahwa target atau sasaran telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan dengan adanya program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial angka lansia terlantar di Kabupaten Bantul tahun 2016 semakin menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial, Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah cukup baik karena kualitas pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur dan Lansia pun menanggapi dengan respon yang baik. Akan tetapi masih adanya kekurangan dalam kualitas layanan dikarenakan program tersebut belum bisa dilakukan secara bersamaan di seluruh Kabupaten bantul.

c. Responsibilitas

Responsibilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial sudah berjalan sangat efektif dan efisien. Melihat kegiatan yang dilaksanakan sudah dilakukan sesuai dengan visi dan misi program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial dan kesesuaian tujuan serta sasaran dalam program ini sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Selain itu seluruh kegiatan dan pelaksanaan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial.

d. Responsivitas

Responsivitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial demi mensejahterakan lansia dan menurunkan angka lansia terlantar sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, wewenang dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan setiap kegiatan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang memuat tanggung jawab, evaluasi serta keterbukaan dalam melaksanakan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial sudah dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini belum ada keluhan mengenai ketidaknyamanan atas tanggung jawab yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat. Juga tidak adanya ketidakterbukaan antara pegawai dengan masyarakat maupun antar sesama pegawai dan evaluasi yang selalu dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5.2.Saran

1. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk lebih diperluas lagi jangkauan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial mengingat untuk saat ini baru sebagian besar wilayah yang menerima program tersebut dikarenakan sistem yang digunakan adalah bergilir.
2. Untuk Desa sebaiknya selalu meningkatkan pelayanan mengingat objek dari program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial adalah lansia yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri jadi hidupnya harus bergantung dengan orang lain. Dan harus lebih teliti dalam mendata lansia-

lansia yang membutuhkan bantuan dari program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial.

3. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan program Aslut dan Pelatihan Lansia Potensial semoga uang yang didapat bermanfaat dan digunakan sesuai kebutuhan lansia tersebut, dan untuk lansia potensial semoga peralatan yang didapat bisa mengembangkan ilmu yang telah didapat dari pelatihan tersebut.

6. Daftar Pustaka

Hasibuan(1990), *Malayu SP. Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta : Gunung Agung

Eriek Prayogi(2013), *Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Desa Wisata*

Moh.Natsir(1998), *Metode Penelitian*, Ghalih

www.merdeka.com/uang/jumlah-penduduk-lansia-di-yogyakarta-tertinggi-di-indonesia.html

www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/23/mioild-lansia-terlantar-di-diy-meningkat-1679-persen